



**BU
MN**

KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA

Peran PaDi UMKM dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Loto Srinaita Ginting

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, Kementerian BUMN

Jakarta, 22 Februari 2024

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**BU
MN**

Statistik & Potensi UMKM Indonesia

UMKM merupakan pilar penting pembangunan ekonomi Indonesia. UMKM menyumbang 61% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha.



61%

Kontribusi
terhadap PDB



97%

Penyerapan
Tenaga Kerja

Besar

5 rb (0,01%)

Menengah

65 rb (0,10%)

Kecil

798 rb (1,22%)

Mikro

64.601 rb (98,7%)

Atensi Pemerintah terhadap UMKM Indonesia

Memperhatikan pentingnya peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian, **Pemerintah memberikan atensi terhadap penyerapan produk UMKM oleh BUMN**, yang diwujudkan melalui PaDi UMKM

PRESIDEN RI, JOKO WIDODO

--Kementerian/Lembaga dan seluruh Pemda serta BUMN agar **meningkatkan penggunaan produk lokal (termasuk produk UMKM)** sehingga akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja--

--BUMN agar menyerap produk UMKM--



MENTERI BUMN, ERICK THOHIR

--BUMN wajib mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang atau jasa--

--BUMN harus membuka diri dengan UMKM, jangan menjadi Menara Gading--

Peran Pemerintah dan BUMN terhadap Pengembangan UMKM

Pemerintah maupun BUMN memberi perhatian lebih kepada UMKM melalui berbagai **regulasi** sebagai bentuk keberpihakan kepada UMKM

UU No. 11 Tahun 2020

CIPTA KERJA

Pendampingan dan Inkubasi Pengembangan UMKM

Pasal 89, 98-102

Kemitraan Usaha Menengah dan Besar dengan UMK

Pasal 90

Kemudahan Perizinan & Akses Tempat Usaha

Pasal 91 & 104

Kemudahan Pembiayaan dan Insentif

Pasal 92

Alokasi Belanja untuk UMK & Koperasi

Pasal 97

PP No. 7 Tahun 2021

Penyediaan pembiayaan bagi UMK dalam bentuk pinjaman atau hibah

Pasal 129

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan UMK pada Infrastruktur Publik

Pasal 60 - 67

Kemitraan BUMN dengan UMKM untuk Meningkatkan Kapasitas UMKM

Peran BUMN dalam mendukung tumbuh kembangnya UMKM melalui berbagai kemitraan dari hulu hingga hilir yaitu mulai dari proses pembinaan hingga distribusi dan akses pasar

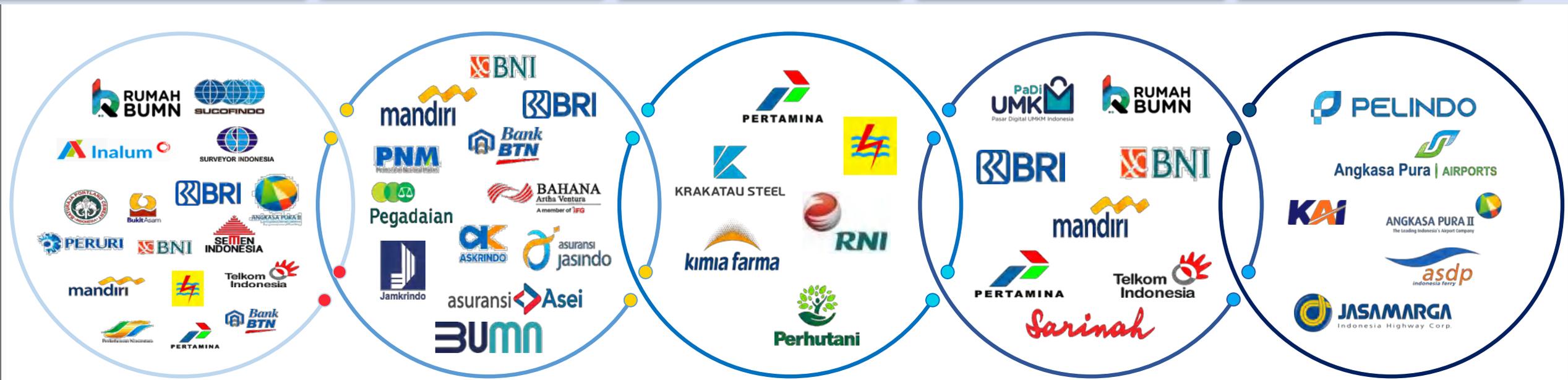
Pengembangan
UMKM Naik Kelas*

Akses
Pembiayaan**

Rantai
Pasok

Kurasi dan Perluasan
Akses Pasar

Akses Tempat
Usaha***



- *) termasuk Sertifikasi Produk
- **) termasuk Penjaminan dan Asuransi
- ***) pada infrastruktur publik

Catatan:

Daftar logo BUMN merupakan contoh (keterwakilan), sehingga dimungkinkan terdapat BUMN yang belum tercantum secara spesifik pada masing-masing pola kemitraan

Regulasi Penggunaan PDN & Produk KUMKM, serta Implementasi PaDi UMKM

❑ **Inpres Nomor 2 tahun 2022**

Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMK dan Koperasi

❑ **SE Menteri BUMN No. SE-10/MBU/08/2020**

Peningkatan Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Usaha Milik Negara;

❑ **Surat Menteri BUMN No. S-563/MBU/08/2020, S-1134/MBU/12/2020, S-646/MBU/09/2021**

Penggunaan Pasar Digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("PaDi UMKM") pada Proses Pengadaan dan Pembelian Barang dan/atau Jasa pada UMKM di Lingkungan BUMN Disertai Pelaporannya;

❑ **Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018**

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Implementasi PaDi UMKM (pengadaan barang/jasa secara digital) dijadikan sebagai salah satu rencana aksi program Stranas PK periode 2023-2024 di lingkungan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN.

Milestone Pasar Digital (PaDi) UMKM

Penyusunan Konsep
PaDi UMKM

Apr
2020

15 Jun
2020

Kick Off
PaDi UMKM

17 Agt
2020

Launching
PaDi UMKM
(piloting pada 9 BUMN)

Perluasan
Implementasi
PaDi UMKM
(tambahan 47 BUMN)

TW II -
2021

TW III -
2021

“ Perluasan
Implementasi
PaDi UMKM
(pada all BUMN) “



Direksi:

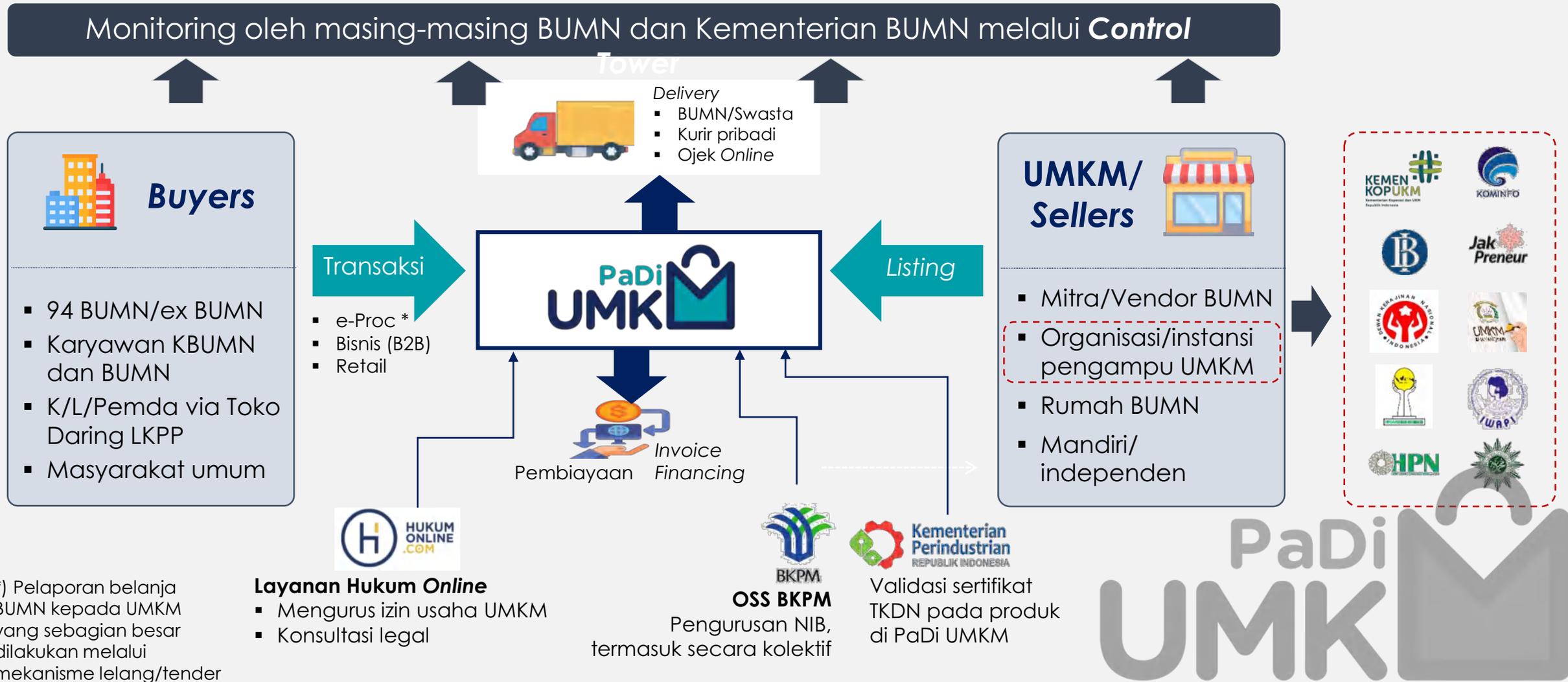
- **Mengoptimalkan penggunaan platform PaDi UMKM** untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa kepada UMKM serta pelaporannya;
- **Mendorong anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi** yang terkonsolidasi dengan BUMN untuk turut mengimplementasikan PaDi UMKM.

Dewan Komisaris:

Mengawasi implementasi PaDi UMKM pada masing-masing perusahaannya.

Ekosistem PaDi UMKM

Ekosistem berbasis platform digital yang mempertemukan UMKM dan BUMN untuk melakukan transaksi, sekaligus membuka kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh nilai tambah dan mendorong "UMKM Naik Kelas".



*) Pelaporan belanja BUMN kepada UMKM yang sebagian besar dilakukan melalui mekanisme lelang/tender



UMKM

- Potensi pasar yang besar, dari BUMN/Perusahaan Anak serta karyawan.
- Potensi pasar yang lebih luas yaitu dari K/L/Pemda dan masyarakat umum
- Kepastian pembayaran dari BUMN dan dimonitor langsung oleh manajemen BUMN maupun KBUMN
- Ketersediaan fasilitas pembiayaan dengan mudah
- *Feedback (rating)*, informasi, dan pembinaan untuk peningkatan kualitas produk
- Potensi memperoleh pelatihan, kurasi, sertifikasi, konsultasi hukum, dsb



Pemerintah

- Data & profil UMKM secara terverifikasi
- Mendukung kelancaran dan efektivitas program pengembangan UMKM
- Mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan, terutama sektor UMKM

Manfaat PaDi UMKM



BUMN

- Ketersediaan barang, jasa, dan penyediaanya secara terverifikasi dan/atau terkurasi
- Kelengkapan dokumen yang menyertai proses pembelian termasuk perpajakan
- Penghematan waktu dan biaya (efisien)
- Mendapatkan alternatif produk lebih beragam dan pilihan harga yang bersaing
- Kemudahan pembayaran termasuk adanya opsi pembayaran tempo
- Meningkatkan tata kelola (transparansi)



Lembaga Pembiayaan

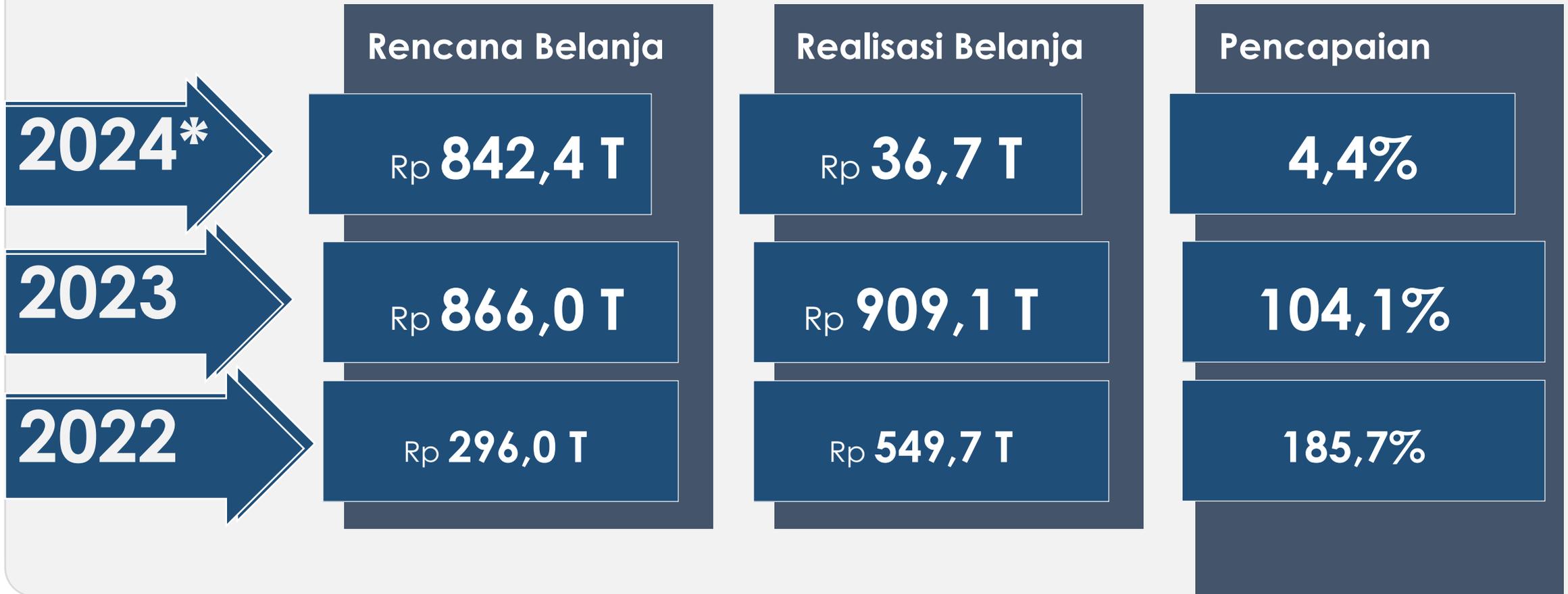
Potensi penyaluran pembiayaan secara lebih luas dan aman



Jasa Logistik

- Potensi peningkatan pendapatan
- Pemanfaatan aset dan sarana logistik, termasuk transportasi dan pergudangan

Rencana & Realisasi Belanja PDN BUMN



* Data Realisasi Belanja s.d. Januari 2024

Dalam triliun rupiah

Highlight Belanja BUMN kepada UMKM

Nilai belanja BUMN kepada UMKM tahun 2023 mencapai Rp44,1 triliun atau tumbuh 56,9% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menegaskan komitmen BUMN dalam mendorong tumbuh kembangnya UMKM di Indonesia.



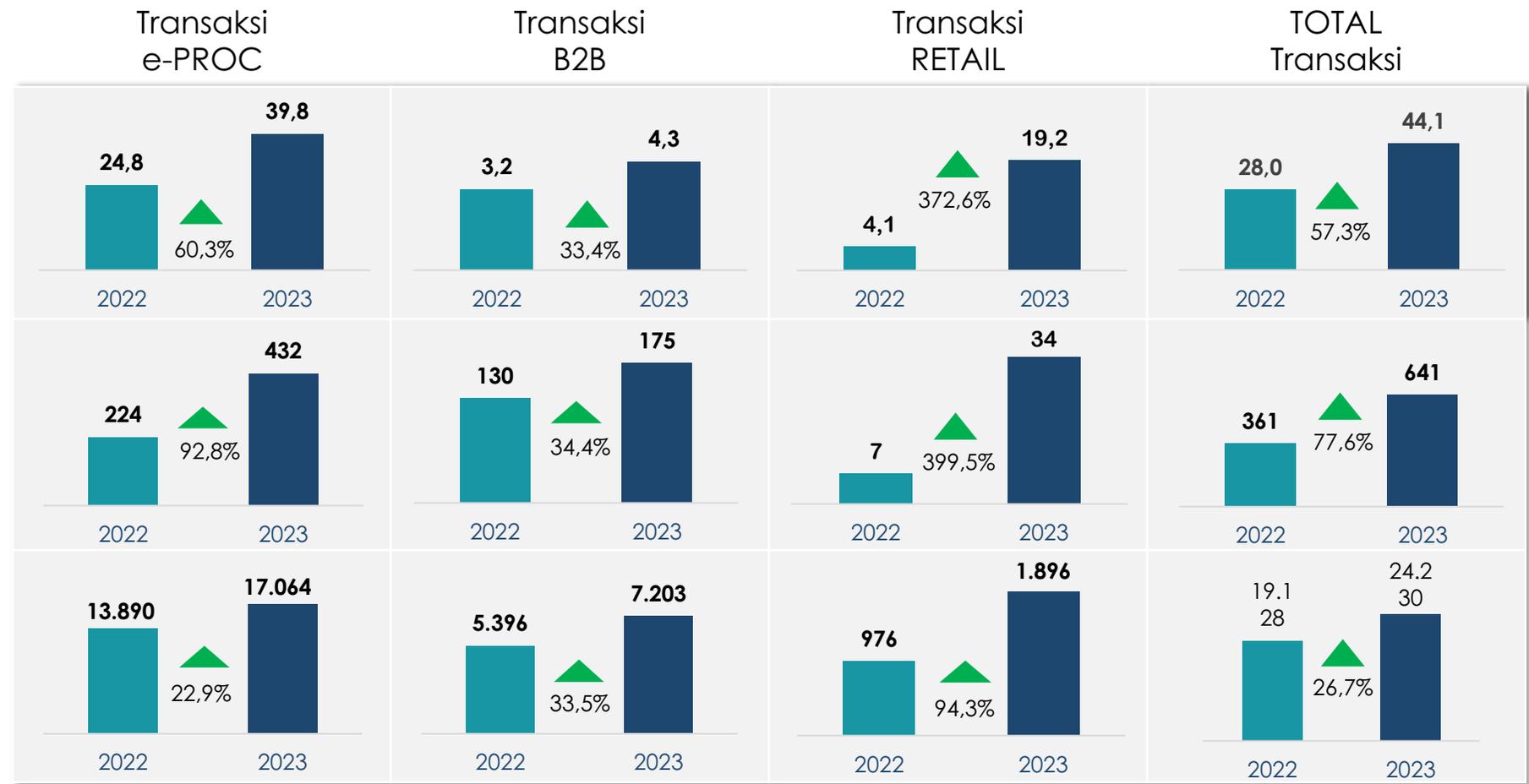
Volume Transaksi



Frekuensi Transaksi (ribu)

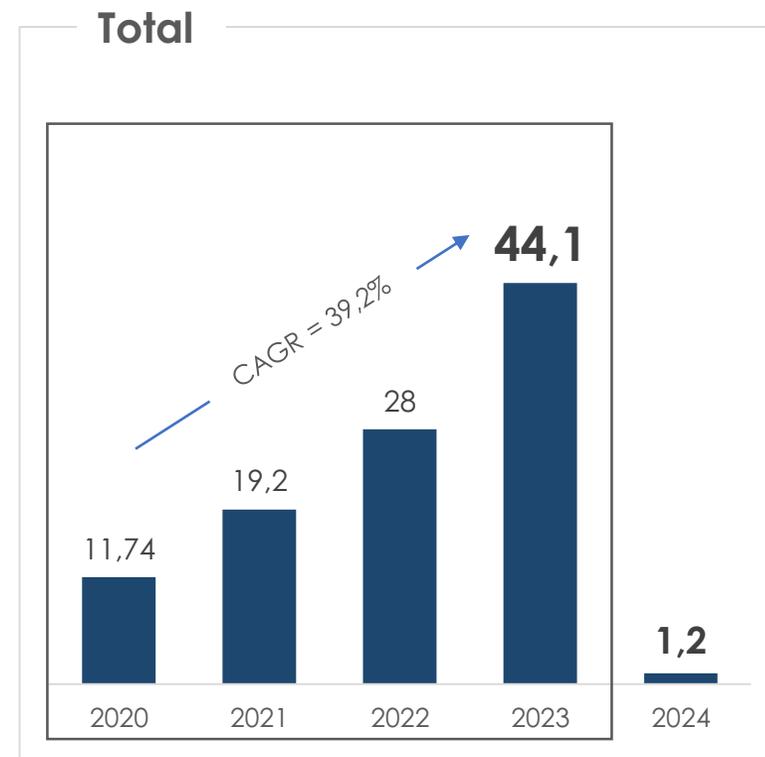
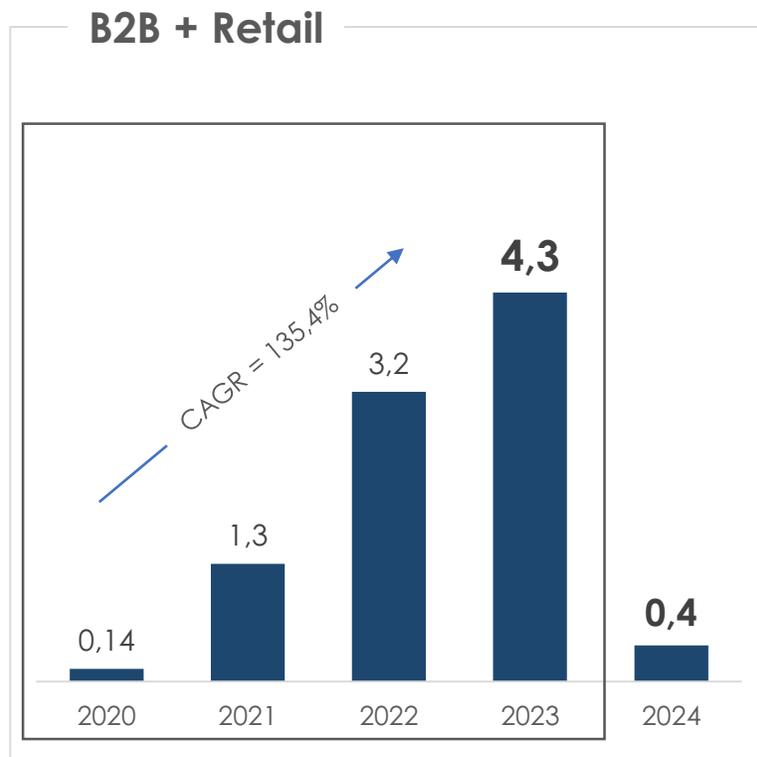
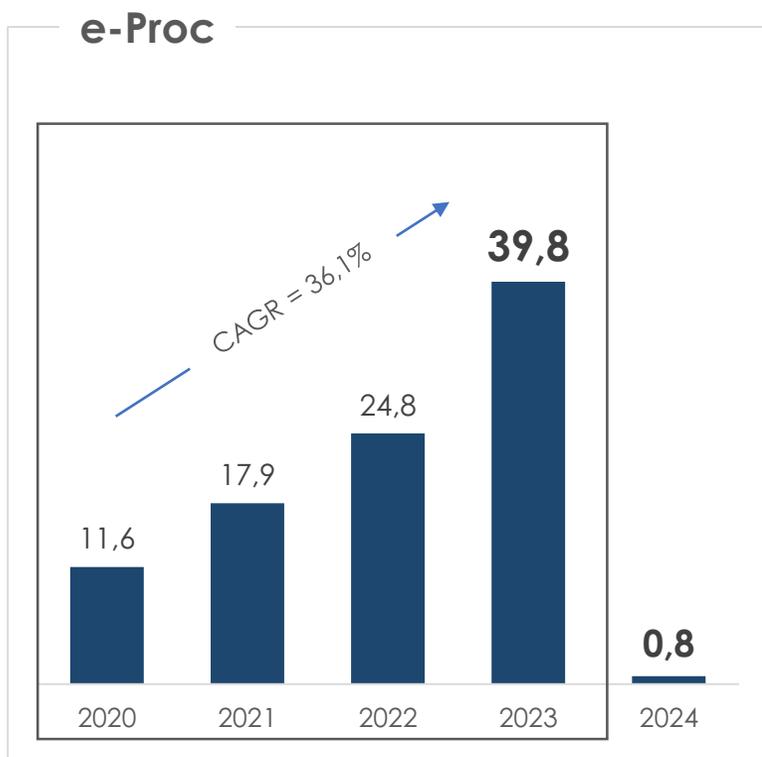


UMKM Transaksi



(dalam triliun rupiah)

Transaksi Belanja BUMN Pada PaDi UMKM Tahun 2020 s.d. 2024



* Data tahun 2024 s.d. 31 Januari 2024

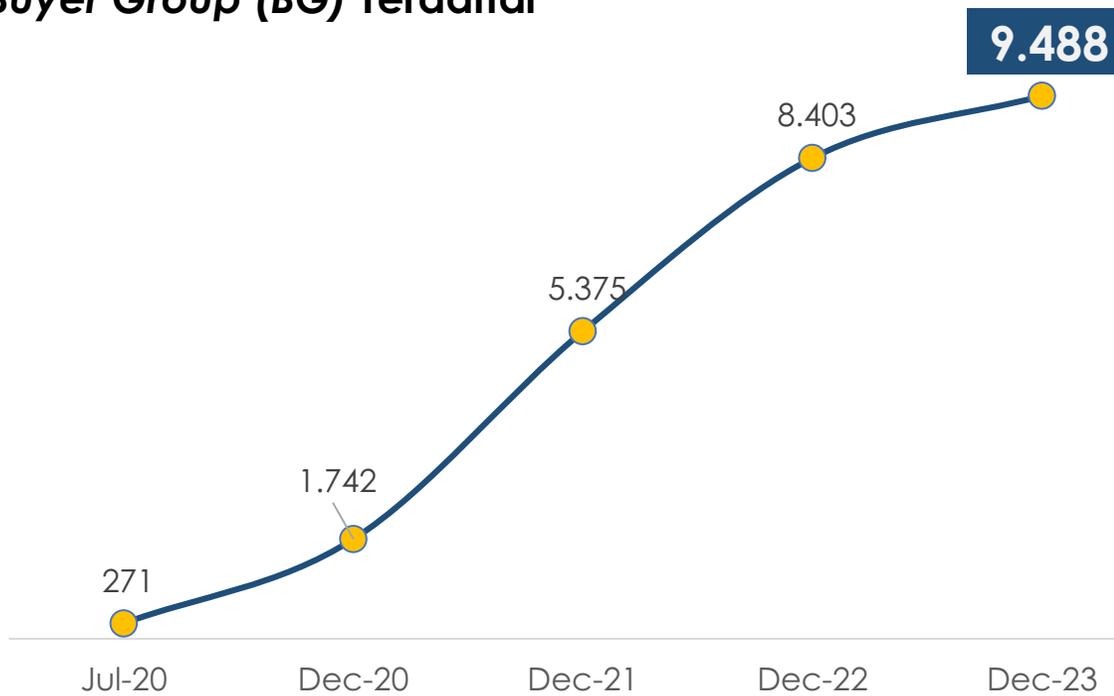
dalam triliun rupiah

Buyer Group *
9.488

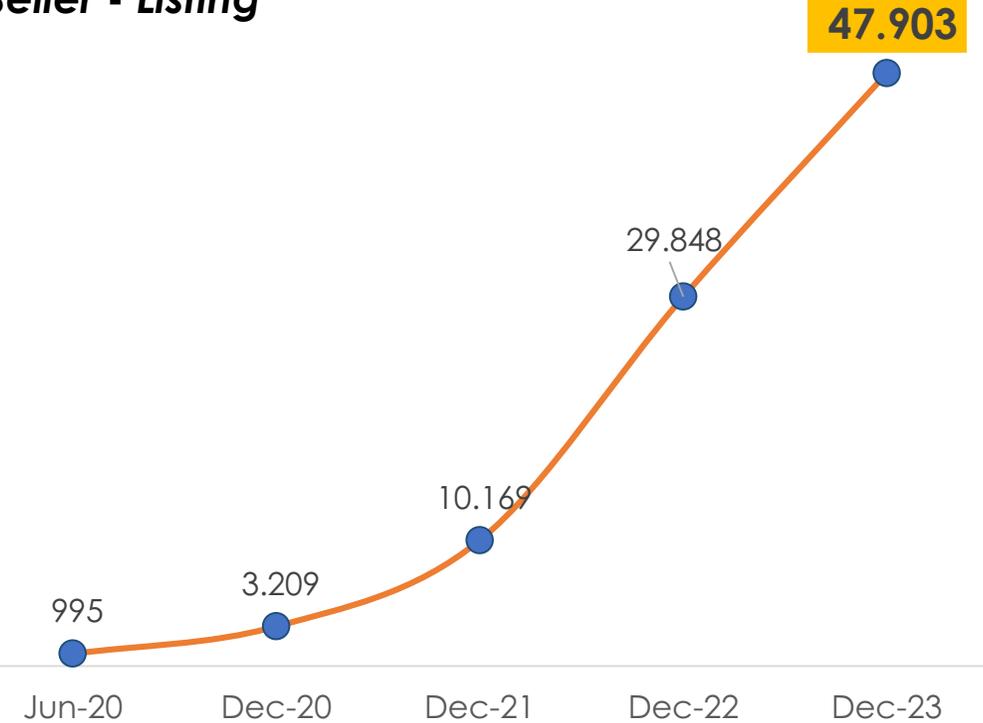
Produk
> 1,4 juta

Seller - Listing
> 47 ribu

Buyer Group (BG) Terdaftar



Seller - Listing



Kemitraan UMKM dalam Rantai Pasok BUMN

BUMN sebagai *off-taker* produk hasil produksi UMKM terutama terkait dengan proses bisnis BUMN yang diperlukan secara rutin, sehingga kemitraannya lebih sustain



MoU Kemitraan UMKM dalam Rantai Pasok BUMN

Telah dilakukan penandatanganan MoU antara Kemenkop & UKM, Kemenperin, dan KBUMN tentang Kemitraan Koperasi, UMKM/IKM dalam Rantai Pasok BUMN



Perluasan Kemitraan UMKM dalam Rantai Pasok BUMN

Memperluas kemitraan BUMN & UMKM dalam rantai pasok BUMN



Potensi UMKM Memasok Kebutuhan BUMN

Atas potensi kemitraan tersebut agar dilakukan peninjauan bersama UMKM/IKM dan koordinasi dengan Kemenperin atau Kemenkop UKM (bila diperlukan), dengan tetap mengedepankan kualitas dan standardisasi yang ditetapkan

Events Highlights 2023

Business Matching



Tujuh kali penyelenggaraan di berbagai kota seperti Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Manado

Pelatihan UMKM



Pelatihan kepada pelaku UMKM terkait Sertifikasi TKDN, Cara Ekspor Anti Ribet, Akses Permodalan, dsb berkolaborasi dengan Dekranas

Bazar/Expo



11 kali pelaksanaan Bazar UMKM untuk Indonesia dan 1 kali PaDi UMKM Expo secara *hybrid* berlokasi di Sarinah, Jakarta

Gernas BBI Jakarta



Gernas BBI dan BBWI 2023 Prov. DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dengan puncak kegiatan di Kawasan Kota Tua

Temu Sobat PaDi



Bertatap muka dengan *seller* melalui event Temu Sobat PaDi UMKM, untuk memperoleh masukan guna perbaikan dan pengembangan berkelanjutan

Awarding



PaDi UMKM mendapatkan penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

PaDi UMKM Memperoleh Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023



Terima Kasih atas Seluruh Kolaborasi BUMN dalam Implementasi PaDi UMKM



**BU
mn**

KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA

BUmn UNTUK
INDONESIA

Terima Kasih

